II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi Partai Politik

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 11, Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik rakyat Indonesia, dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Russell J. Dalton, dan Martin P. Wattenberg menggambarkan fungsi partai politik secara lebih lengkap dari setiap bagian (Sigit Pamungkas,2011:15), yaitu:

Tipe Bagian Partai Politik

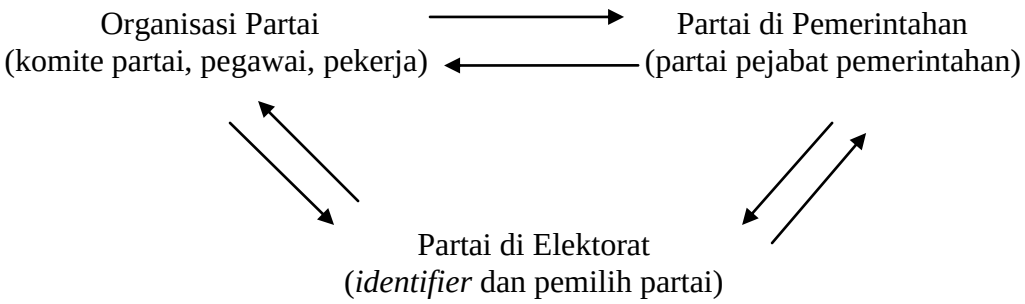

Sumber: Partai Politik (Sigit Pamungkas, 2011:16)
Gambar1. Tipe bagian partai politik

Pertama adalah fungsi partai di elektorat *(parties in the electorate)*. Pada bagian ini fungsi partai menunjuk pada penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi. Terdapat empat fungsi partai yang termasuk dalam fungsi elektorat, yaitu:

1. Pertama, menyederhanakan pilihan bagi pemilih. Politik adalah fenomena yang komplek, pemilih rata-rata mengalami kesulitan dalam memahami semua persoalan dan mengkonfortasi berbagai isu-isu dalam pemilu. Partai politik membantu untuk membuat politik *"user friendly"* bagi warga negara. Sekali pemilih mengetahui partai mana yang biasanya mewakili kepentingan mereka, ini menjadi kunci informasi sebagai layar persepsi membantu bagaimana mereka melihat persoalan dan berperilaku ketika pemilihan.

2. Kedua, pendidikan warga negara. Partai politik adalah edukator, pada konteks itu partai politik adalah mendidik, menginformasikan dan membujuk masyarakat untuk berperilaku tertentu. Partai politik bertugas memberikan informasi politik yang penting bagi warga negara. Selain itu partai politik juga mendidik warga negara mengapa mereka harus mengambil posisi kebijakan tertentu. Pemilu menjadi salah satu kursus pendidikan warga negara yang bersifat masal.
3. Ketiga, membangkitkan symbol identifikasi dan loyalitas. Dalam sistem politik yang stabil, pemilih memerlukan jangkar politik, dan partai politik dapat memenuhi fungsi itu. Ketertarikan partisipan terhadap partai politik dapat melestarikan dan menstabilkan pemerintahan demokratis, menciptakan kesinambungan pilihan pemilih dan hasil pemilu.
4. Keempat, mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi. Di hampir semua negara demokratis, partai politik memainkan peran penting dalam mendapatkan orang untuk memilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan. Partai politik memobilisasi warganegara untuk terlibat dalam kampanye, serta berpartisipasi dalam aspek-aspek lain proses demokratisasi.

Kedua adalah fungsi partai sebagai organisasi *(parties as organization)*. Pada fungsi ini menunjuk pada fungsi-fungsi yang melibatkan partai sebagai organisasi politik, atau proses-proses didalam organisasi partai itu sendiri. Pada bagian ini partai politik memiliki empat fungsi:

1. Pertama, rekruitmen kepemimpinan politik dan mencari pejabat pemerintahan. Fungsi ini sering disebut sebagai salah satu fungsi paling mendasar dari partai politik. Pada fungsi ini partai politik aktif mencari,

meneliti, dan mendesain kandidat yang akan bersaing dalam pemilu. Desain rekruitmen kemudian menjadi aspek penting yang harus dipikirkan partai untuk menjalankan fungsi ini. Kualifikasi siapa yang akan diseleksi, siapa yang menyeleksi, diarena mana kandidat diseleksi, siapa yang menyelksi, diarena mana kandidat diseleksi, dan siapa yang memutuskan nominasi, serta sejauh mana serajat demokrtisasi dan desentralisasi adalah pertanyaan-pertanyaan kunci dalam desain seleksi kandidat.

2. Kedua, pelatihan elit politik. Dalam fungsi ini partai politik melakukan pelatihan dan pembekalan terhadap elit yang prospektif untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Berbagai materi pelatihan dapat meliputi pemahaman tentang proses demokrasi, dan prinsip-prinsip partai, serta berbagai persoalan strategis yang dihadapi oleh bangsa dan pilihan-pilihan fungsi utama partai di pemerintahan :kerja dari sistem demokrasi.
3. Ketiga, pengartikulasian kepentingan politik. Pada fungsi ini partai politik menyuarakan kepentingan-kepentingan pendukungnya melalui pilihan posisi dalam berbagai isu politik dan dengan mengekspresikan pandangan pendukungnya dalam proses pemerintahan.
4. Keempat, pengagresian kepentingan politik. Fungsi ini membedakan partai dengan kelompok kepentingan, yaitu partai melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan, sedangkan kelompok kepentingan terbatas pada artikulasi kepentingan.

Ketiga, adalah fungsi partai dipemerintahan *(parties in government)*. Pada arena ini, partai bermain dalam pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintahan. Partai telah identik dengan sejumlah aspek kunci proses demokratik. Terdapat tujuh fungsi partai dipemerintahan:

1. Pertama, menciptakan mayoritas pemerintahan. Fungsi ini dilakukan setelah pemilihan. Partai-partai yang memperoleh kursi di parlemen dituntut untuk menciptakan mayoritas politik agar dalam sistem parlementer dapat membentuk pemerintahan, atau dalam sistem parlementer dapat membentuk pemerintahan, atau dalam sistem presidensil, mengefektifkan pemerintahan.
2. Kedua, pengorganisasian pemerintahan. Pada fungsi ini, partai politik menyediakan mekanisme untuk pengorganisasian kepentingan dan menjamin kerjasama diantara individu-individu legislator.
3. Ketiga, implementasi tujuan kebijakan. Ketika dipemerintahan, partai politik adalah actor sentral yang menentukan output kebijakan peerintahan. Normalnya, peaksanaan fungsi ini dibentuk dari transformasi manifesto partai dan janji kampanye.
4. Keempat, mengorganisasikan ketidaksepakatan dan oposisi. Fungsi ini diperankan oleh partai-partai yang tidak menjadi bagian dari penguasa (eksekutif). Pada fungsi ini, partai oposisi mengembangkan alternative kebijakan yang ditempuh penguasa.
5. Kelima, menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah. Adanya partai oposisi menyiratkan kepada siapa tanggungjawab sebuah pemerintahan

harus dibebankan, yaitu partai penguasa. Partai penguasa bertanggungjawab terhadap berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah.

6. Keenam, control terhadap administrasi pemerintahan. Fungsi ini terkait dengan peran partai dalam ikut mengontrol birokrasi pemerintahan.
7. Ketujuh, memperkuat stabilitas pemerintahan. Stabilitas pemerintahan secara langsung terkait dengan tingkat kesatuan partai politik. Stabilitas partai membuat stabil pemerintahan, dan stabilitas pemerintahan berhubungan dengan stabilitas demokrasi. Dalam kerangka itu, fungsi partai untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dan demokrasi adalah menjaga stabilitas partai.

Berdasarkan penjelasan fungsi partai politik diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi partai politik adalah untuk membantu masyarakat menyalurkan aspirasinya dan membantu masyarakat berpartisipasi dalam politik, mengawasi jalannya pemerintahan dan mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis.

1. Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Partai Politik di Indonesia

Ada beberapa faktor yang bias menjadi penyebab gagalnya sebuah partai politik di Indonesia menjalankan fungsinya, yaitu:

a. Sistem Kepartaian di Indonesia

Sejak zaman kemerdekaan , Indonesia mengadopsi sistem multi partai dengan segala variannya sebagai wujud kemajemukan (beragamnya kepentingan dan kelompok sosial) Indonesia. Secara spesifik pada negara berkembang, partai politik yang ada akan

membentuk sistem yang terpolarisasi sebagai akibat dari lebarnya jarak ideologi. Keadaan tersebut akan menghasilkan pemerintahan yang tidak stabil karena partai politik yang cenderung untuk terlibat dalam konflik horizontal. Hal itu juga yang menyebabkan partai politik kurang dapat menjalankan fungsi komunikasi dan sosialisasi politik di masyarakat.

b. Budaya Elitisme

Partai politik di Indonesia masih dikuasai oleh kelompok-kelompok (faksi) tertentu. Pada perkembangannya, budaya tersebut membuat partai hanya dikuasai oleh elit-elit tertentu dsn bahkan menjadi semacam dinasti politik dalam partai. Hal itu mungkin menjadi strategi partai politik untuk mempertahankan ideologi dan kepentingannya. Kalau sudah begitu, fungsi rekrutmen partai politik tidak akan berjalan sempurna dan bisa menjadi pengaruh buruk dalam pendidikan politik di masyarakat.

c. Pragmatisme Partai Politik

Pada dasarnya, ideologi partai politik di Indonesia dipengaruhi oleh jalur-jalur agama, kelas dan kebangsaan. Namun pada dewasa ini, idealisme partai seakan dikalahkan oleh budaya pragmatisme yang menyebabkan partai politik di Indonesia lebih berpikir untuk mempertahankan kekuasaan politiknya saja daripada mempertahankan idealismenya.

Kendala pelaksanaan fungsi partai politik di Indonesia secara garis besar disebabkan karena partai politik di Indonesia lebih berpikir

untuk mempertahankan kekuasaan politiknya saja daripada mempertahankan idealismenya.

B. Wajah Partai Politik

Menurut Richard Katz dan Peter Mair dalam *The Evolution of Party Organizations in Europe: Three Faces of Party Organization* (1994). Menurut mereka, partai politik sejatinya memiliki tiga wajah:

1. *Party in public office* yaitu partai politik dengan keterwakilan kader di parlemen (DPR) dan jajaran pemerintahan (menteri).

   Pada wajah ini, kader-kader partai akan melakukan maksimalisi untuk kesempatan politik *(political opportunity)* untuk melakukan agenda politik partai. Selain itu mereka-mereka ini juga akan mengoptimalkan usaha-usaha untuk pendanaan partai politik. Gesekan antar partai di Parlemen ataupun pemerintahan menjadi sangat kentara.
2. *Party in the ground* yaitu aktivitas partai diakar rumput yang menjadi jantung dari pemeliharaan lumbung suara partai politik. Pada tahap ini agenda-agenda parpol akan terus dikonsolidasikan dan proses mobilisasi sumber daya *(resource mobilizations)* dilakukan untuk menjaring calon-calon anggota legislatif yang berintegritas dan memiliki kapabilitas. Kinerja masing-masing level parpol ini, baik pusat maupun akar rumput (daerah) menjadi unjung tombak yang dapat memicu minat dan ketertarikan rakyat.

3. *Party in the central office* yaitu aktivitas partai yang berada dipusat yang melakukan ragam konsolidasi, taktik, dan strategi dalam memenangkan pemilu. Pada tahap ini partai politik membentuk strategi, dan upaya-upaya untuk menarik minat masyarakat agar partai menang dalam pemilu. (www.google.com/wajah-parpol-menurut-Katz-Mier/kompas.com, 29 mei 2013)

   Masing-masing wajah partai ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Namun sejatinya adalah satu kesatuan upaya partai untuk meyakinkan rakyat dan dapat memenangkan pemilu.

C. Rekrutmen Politik

Menurut Miriam Budiarjo (1994:202) rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Menurut Czudnowski dalam Sigit Pamungkas (2011:91) rekrutmen politik adalah proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif.

Sedangkan menurut Haryanto (1984:46) rekrutmen politik merupakan penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk menduduki jabatan-kabatan politik maupun jabatan pemerintahan.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai politik memilih dan mengangkat tokoh-tokoh politik yang kemudian mengenalkan mereka

pada peranan-peranan khusus dalam sistem politik dan berpartisipasi dalam proses politik

1. Proses Rekrutmen Politik

Menurut Czudnomski dalam Partai Politik dan kebijakan Publik (Fadillah Putra,2008:57) ada beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut:

a. *Partisan*, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
b. *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
c. *Immediate survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
d. *Civil service reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

Partai politik dapat menentukan sendiri proses rekrutmen mana yang akan digunakan untuk melakukan proses rekrutmen. Proses yang dipilih partai politik menentukan karakteristik partai politik itu sendiri. Tentu

saja partai politik menginginkan kader yang loyalis terhadap partai, sehingga partai politik dapat menduduki jabatan-jabatan politik dipemerintahan suatu negara. Maka proses rekrutmen yang seharusnya digunakan adalah proses *partisan* dan *Compartmentalization*.

2. Mekanisme Rekrutmen Politik

Menurut Czudnomski dalam Partai Politik dan kebijakan Publik (Fadillah Putra,2008:77) mekanisme rekrutmen politik antara lain:

a. Rekrutmen Terbuka, di mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

1. Mekanismenya demokratis
2. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki
3. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi
4. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

b. Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Berdasarkan penjabaran tentang mekanisme rekrutmen politik di atas, maka sistem terbuka mencerminkan partai tersebut betul-betul demokratis dalam menentukan syarat-syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon elit politik. Sistem yang demokratis akan dapat mencerminkan elit politik yang demokratis pula. Sedangkan mekanisme rekrutmen politik yang tertutup akan dapat meminimalkan kompetisi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan, karena proses yang ditempuh serba tertutup. Sehingga masyarakat kurang mengetahui latar belakang elit politik yang dicalonkan partai tersebut.

3. Variabel Penting dalam Proses Rekrutmen dan Pengembangan Kader

Ada beberapa variabel penting dalam proses rekrutmen politik, yaitu:

a. Kualitas Rekrutmen

Partai harus memiliki kualifikasi standar untuk merekrut para kandidat. Biasanya, dalam era baru demokrasi, partai merekrut para kandidat yang bersedia untuk memberikan kompensasi politik dan keuangan untuk pencalonan dirinya. Kualifikasi standar sebaiknya mencakup aspek-aspek, seperti integritas, dekat dengan rakyat (*societal roots*), pengalaman politik, keterampilan dasar, dan sesuai dengan platform partai.

b. Standarisasi Rekrutmen dan Kepatuhan

Standarisasi rekrutmen harus dilakukan secara konsisten di seluruh kantor daerah partai politik, guna memastikan praktek rekrutmen yang umum dan para kandidat memiliki kualifikasi yang sama diseluruh tingkatan.

c. Desentralisasi Rekrutmen

Hampir tidak mungkin bagi kantor pusat partai politik untuk memverifikasi seluruh proses seleksi secara efektif, sehingga diperlukan desentralisasi dalam tingkatan tertentu. Kantor pusat partai seharusnya berpartisipasi secara aktif dalam menyeleksi kandidat parlemen di tingkat nasional, akan tetapi ketika menyeleksi kandidat provinsi dan kecamatan kantor pusat partai seharusnya juga memiliki peran utama. Dalam

mengimplementasikan struktur yang terdesentralisasi, kantor pusat partai hanya menyediakan mekanisme kontrol untuk memastikan unsur kepatuhan sesuai dengan standarisasi yang tersedia dalam penyeleksian. Kantor daerah partai dapat berpartisipasi dalam menyeleksi para kandidat di tingkat administrasi yang lebih tinggi dengan memberikan masukan dan informasi tentang kandidat. Singkatnya, terdapat tiga aspek utama dalam rekrutmen, antara lain kualitas kualifikasi, standarisasi dan kepatuhan, dan tingkat desentralisasi.

d. Kualitas Pengembangan Kader

Kegiatan pengembangan kader di dalam partai politik harus berkaitan dengan kualilfikasi nominasi. Bahan untuk pengembangan kader harus memasukkan pembangunan integritas, mendorong dan melatih para kader guna membangun kedekatan dengan masyarakat dan program partai politik, pelatihan keterampilan dasar di dalam organisasi, dan promisi ideologi dan platform partai. Pengembangan kader dilakukan guna mencapai tujuan sebagai berikut: Petama, membangun partai dengan sumber internal untuk pemilihan para kandidat dan memastikan proses regenerasi di dalam tubuh partai dengan memunculkan beberapa pemimpin partai masa depan. Kegiatan pengembangan kader yang dilakukan secara regular merupakan indikator kualitas proses di dalam partai.

e. Standarisasi, Kepatuhan, dan Desentralisasi Pengembangan kader

Sama halnya dengan rekrutmen, konsistensi di seluruh tingkatan yang berbeda dalam organisasi partai memastikan kader dengan kualitas yang merata. Partisipasi dari anggota partai di tingkatan yang berbeda dalam organisasi juga dapat memastikan efisiensi dalam proses yang berarti kader daerah tidak harus bergantung hanya pada kantor pusat partai.

(http://asy-iepha.blogspot.com/2012/07/rekrutmen-politik.html, diakses 16 Juni 2013)

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Rekrutmen Politik

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rekrutmen politik bukan mempertanyakan atau membahas siapa yang akan menjadi bakal calon pemimpin untuk negeri ini kedepannya melainkan lebih menekankan terhadap persoalan disekitar politik, kekuasaan rill dan berada disuatu historis.

a. Persoalan di sekitar politik berarti setiap calon-calon pemimpin yang akan dipilih harus mampu mengoptimalisasikan segala tenaga dan upayanya untuk menyeimbangkan segala polemik-polemik yang sedang terjadi di negara ini untuk dipersempit dampaknya.Sehingga iming-iming tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat luas untuk memilihnya sebagai calon pemimpin kedepannya.

b. Kekuasaan rill berarti seorang calon pemimpin harus memiliki teknik yang tersimpan di dalam konsep pikiranya untuk dikembangkan ketika telah menjadi pemimpin. Konsep tersebut berisi suatu cara bagaimana mempengaruhi masyarakat luas sehingga mampu dipercaya untuk memimpin dalam periode yang lama dan abadi.
c. Berada dalam suatu historis artinya setiap pemimpin otomatis menginginkan nama dan jasa-jasanya selalu terekam dalam benak pikiran masyarakat dan setiap calon pemimpin harus mampu merangkai konsep tersebut sebelum dirinya terpilih menjadi pemimpin.

(http://asy-iepha.blogspot.com/2012/07/rekrutmen-politik.html, diakses 16 Juni 2013)

Rekrutmen politik memiliki suatu pola-pola dalam konsepnya. Apabila kita mengkaji pola-pola tersebut maka kita akan mnegetahui bahwa sistem nilai, perbedaan derajat, serta basis dan stratifikasi sosial terkandung di dalam rekrutmen politik. Pola-pola rekrutmen politik ini secara tidak disengaja menjadi indikator yang cukup penting untuk melihat pembangunan dan perubahan suatu negara. Di dalam pola-pola ini memiliki keterkaitan antara rekrutmen dan perekonomian suatu negara mampu menkaji pergeseran ekonomi masyarakat, infrastruktur politik, serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat. Artinya pemimpin-pemimpin yang baru akan membentuk kebijakan-kebijakan terbarunya yang mengarah demi kemajuan negaranya serta faktor

politik menciptakan terjadinya iklim politik yang cukup mempengarauhi pergerakan ekonomi suatu Negara di dalamnya.

5. Jalur-jalur Politik dalam Rekrutmen Politik

Menurut Czudnomski dalam Partai Politik dan kebijakan Publik (Fadillah Putra,2008:112) ada beberapa jalur politik dalam proses rekrutmen politik adalah:

a. Jalur koalisi partai atau pimpinan-pimpinan partai artinya koalisi-koalisi partai merupakan bagian terpenting di dalam rekrutmen politik karena sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik di adopsi dari hasil koalisi-koalisi antarpartai yang berperan dalam suatu lingkup politik.Artinya rekrutmen politik tidak terlepas dari peranan koalisi partai.
b. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kritreia tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat di dalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik.
c. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangya serta mampu

membawa memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat.

d. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial. Di zaman modern ini jalur rekrutmen promodial tidak menutup kemungkinan terjadi di dunia politik. Fenomenal itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindahtangankan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan. Fenomena ini dikenal dengan nama “rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial”.

Berbagai jalur politik dalam proses rekrutmen politik di atas, jelas terlihat bahwa jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi merupakan jalur rekrutmen yang terbaik. Anggota partai politik dididik dan dipersiapkan agar mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangya serta mampu membawa memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat.

D. *Candidate Selection* (seleksi kandidat)

Seleksi kandidat ada diseluruh partai-partai politik, di mana setiap Negara memiliki sistem hukum menentukan kriteria pemilihan calon, atau sistem pemilu meliputi peraturan untuk proses seleksi calon. Menurut Rueven Y Hazan (Candidate Selection,2001) Seleksi kandidat yaitu, proses didominasi extralegal dimana partai politik yang memutuskan dari orang hukum yang layak untuk memegang jabatan elektif akan ditunjuk pada surat suara dan komunikasi pemilu adalah calon yang direkomendasikan dan didukung atau daftar kandidat.

Seleksi calon tidak hanya menentukan pilihan ditempatkan sebelum pemilih, tetapi juga komposisi partai di parlemen. Demikian mempengaruhi yang paling mungkin dan keputusan kebijakan yang dihasilkan yang akan diberlakukan. Apalagi, kandidat partai membantu mendefinisikan karakteristik demografis, geografis, ideologis, dll dari organisasi partainya.

Dalam proses rekrutmen, seleksi calon juga merupakan arena penting bagi perebutan kekuasaan internal partai. mengenai masalah ini, Schattschneider (Rueven Y Hazan, 2001) menyampaikan :

> “bahwa partai membuat nominasi yang efektif, tidak dapat tetap dalam bisnis, untuk pencalonan partai ganda atau beberapa berarti kekalahan tertentu. sejauh pemilihan yang bersangkutan, front persatuan partai, konsentrasi partai nomor dapat terjadi hanya nominasi mengikat. proses pencalonan demikian telah menjadi proses penting dari partai. sifat dari proses pencalonan menentukan sifat partai. ini karena itu salah satu poin yang terbaik di mana untuk mengamati distribusi kekuasaan di dalam partai”

Both Gallager dan Ranney (Rueven Y Hazan, 2001) mendukung statment ini, dan masing-masing mengambil langkah lebih lanjut. Gallagher berpendapat, "kontes atas seleksi calon umumnya lebih intens daripada perjuangan atas manifesto partai". Ranney menambahkan:

> "karena itu tidak surpising bahwa perselisihan faksi paling penting dan diperebutkan dalam partai apapun adalah perjuangan yang berlangsung selama pilihan kandidat, untuk apa yang dipertaruhkan dalam stuggle seperti itu tidak kurang dari kendali inti dari apa partai singkatan dan tidak. memang, setelah pemilihan itu, apa yang sebagian besar masih sebagai inti fungsi hampir semua os pemegang jabatan yang kandidatnya sukses partai".

Berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *candidate selection* (seleksi kandidat) adalah proses dimana suatu partai politik menentukan calon kandidatnya untuk maju dalam pemilihan umum, dimana dalam proses penentuan kandidat tersebut menjadi proses penting dari partai karena sifat dari proses pencalonan menentukan sifat partai ini karena itu merupakan satu poin yang terbaik untuk mengamati distribusi kekuasaan di dalam partai.

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekruitmen politik menurut Rahat dan Hazan dalam Katz dan Crotty 2006 dalam Sigit Pamungkas (2011:93), yaitu:

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*)?

Terkait siapa yang dapat dinominasikan dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas (semua warga negara) atau eklusifitas (anggota partai dan syarat tambahan).

2. Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*)?

   Penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat. Yang disebut lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang, sampai pada pemilih. Penyeleksi dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, sama seperti kontinum kandidasi, berdasarkan tingkat inklusifitas dan eklusifitas. Pada titik ekstrim, penyeleksi adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilu. Dalam ekstrim lain, yaitu selektor sangat eklusif dimana kandidasi ditentukan oleh pemimpin partai.

3. Dimana kandidat di seleksi?

   Ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya, seperti representasi territorial atau fungsional, metode ini disebut sentralistik. Berlawanan dengan metode sentralisasi adalah metode desentralisasi. Pada metode desentralisasi, kandidat diseleksi secara eklusif oleh penyeleksi partai local atau kelompok social intra partai atau kelompok-kelompok seksional.

   Desentralisasi territorial adalah ketika penyeleksi lokal menominasika kandidat partai yang diantaranya dilakukan oleh

pemimpin partai lokal, komite cabang sebuah partai, semua anggota atau pemilih di sebuah distrik pemilihan,

4. Bagaimana kandidat dinominasikan?

   Dalam tahap ini, ada dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs penunjukkan. Dalam sistem pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan yang murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi. Sementara itu dalam sistem penunjukkan, penentuan kanidat tanpa menggunakan pemilihan, dalam sistem penunjukkan murni, kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Berdasarakan uraian di atas, maka Rahat dan Hazan menyampaikan tentang rekrutmen politik yang demokratis yaitu dengan menggunakan tiga tahap dalam Sigit Pamungkas (2011:89). Tiga tahap tersebut adalah:

a. Tahap pertama, sebuah komite kecil menentukan kandidat untuk membuat daftar pendek.
b. Tahap kedua, sebuah perwakilan terpilih dari partai bisa menambah atau mengurangi kandidat dengan menggunakan prosedur khusus dan ini juga mengesahkan kembali kandidat incumbent.

c. Tahap ketiga, anggota partai akan memilih kandidat untuk posisi atau kursi aman diantara para kandidat yang diajukan.

Ada beberapa hal menurut Czudnowski dalam Partai Politik dan kebijakan Publik (Fadillah Putra,2008:107) yang dapat menentukan terpilihnya seseorang dalam lembaga legislatif, sebagaimana berikut;

1. *Social background*: Faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana seorang calon elit dibesarkan.
2. *Political socialization*: Merupakan suatu proses yang menyebabkan seorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus diilaksanakan oleh suatu kedudukan politik.
3. *Initial political activity*: Faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini.
4. *Apprenticeship*: Faktor ini menunjuk langsung kepada proses "magang" dari calon elit ke elit yang lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
5. *Occupational variables*: Calon elit dilihat pengalaman kerjanyadalam lembaga formal yang bisa saja tidak berhubungan dengan politik, kapasitas intelektual dalam kualitas kerjanya.
6. *Motivations*: Orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal yaitu harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik. Selection: Faktor ini menunjukkan pada mekanisme politik yaitu rekrutmen terbukan dan rekrutmen tertutup.

1. Syarat-syarat Calon Anggota Legislatif

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
h. Sehat jasmani dan rohani.
i. Terdaftar sebagai pemilih.
j. Bersedia bekerja penuh waktu.

k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.

o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan

p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Selain persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang Partai NasDem memiliki 6 syarat khusus, yaitu:

1. Telah berusia 21 tahun atau lebih
2. Menyerahkan Curriculum Vitae (CV)
3. Menyerahkan foto copy KTP
4. Menyerahkan ijazah terakhir
5. Membuat surat permohonan untuk menjadi BACALEG sementara Partai NasDem dengan mencantumkan daerah pemilihan yang diinginkan
6. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu

   (Berdasarkan Hasil Prariset Tanggal 20 Agustus 2013)

E. Output Rekruitmen Politik

Klasifikasi tentang output kandidat dalam rekrutmen politik diberikan oleh Siavelis dan Morgenstern dalam Sigit Pamungkas (2011:101) yang membedakan tipe kandidat untuk legislatif dan eksekutif. Pada rekrutmen legislatif terdapat empat tipe kandidat, yaitu loyalis partai *(party loyalist),* pelayan konstituen *(constituent servant),* wirausahawan *(entrepreneur),* dan delegasi kelompok *(group delegate).* Sementara itu, tipe kandidat untuk rekrutmen eksekutif meliputi orang dalam partai *(party insider),* penyokong partai *(party adherent),* dan agen kelompok *(group agent).*

Tabel 2.1 Tipe Kandidat dalam Rekrutmen Legislatif

Tipe Kandidat	**Loyalitas Partai**	**Pelayan Konstituen**	**Wirausahawan**	**Delegasi Kelompok**
Gaya Kampanye	Menyanjung platform partai	Memikat konstituen	Personalistik	Menyanjung permintaan kelompok
Pencari Suara Personal	Tidak Sering	Sering	Sering	Variabel, tergantung kepentingsn individu terhadap kelompok
Orientasi Representasi	Partai sebelum konstituen	Konstituen sebelum partai	Individualistic, penghargaan mendukung kelompok atau individu	Fungsional, kelompok sebelum partai
Tipe Tujuan Pelayanan	Kolektif, programatik, idiologis	*Pork* dan barang publik untuk distrik	*Pork* partikularistik untuk menghargai pendukung	Keuntungan untuk kelompok
Disiplin legislatif. Dukungan untuk presiden	Tinggi	Moderat, dapat dibeli dengan target *pork*	Rendah, pemilihan kepentingan pribadi	Moderat, dapat dibeli dengan penghargaan kelompok

Sumber: Siavelis dan Morgenstern (Sigit Pamungkas, 2011)

Output rekrutmen politik menjelaskan bagaiman tipe-tipe kandidat yang telah diseleksi oleh partai politik. Jelas terlihat perbedaan antara loyalis partai, pelayan konstituen, wirausahawan, dan delegasi kelompok yang lebih membela partai dan memberi kontribusi terhadap partai tentu saja loyalis partai tersebut. Berbeda dengan wirausahawan atau delegasi kelompok yang lebih mengutamakan personalistik maupun kelompoknya masing-masing.

F. Kerangka Pikir

Salah satu fungsi yang sangat penting dari partai politik adalah proses rekruitmen politik. Jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik. Fungsi rekruitmen politik ini menjadikan fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik (Sigit Pamungkas, 2011:89). Rekruitmen politik merupakan sebuah 'kebun rahasia' yang menyimpan banyak misteri dan belum banyak yang terungkap. Fenomena rekruitmen politik dapat menjelaskan banyak hal dari dinamika politik partai.

Setelah melakukan rekrutmen politik, partai politik akan melakukan seleksi kandidat untuk menentukan siapa saja kandidat yang akan maju dalam pemilihan umum mewakili partainya, fokus penelitian ini adalah bagaimana proses seleksi calon anggota legislatif Partai NasDem pada Pemilu 2014.

Terdapat empat hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekruitmen politik menurut Rahat dan Hazan dalam Katz dan Crotty 2006 dalam Sigit Pamungkas (2011:93), yaitu:

1. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan (*Candidacy*)?
2. Siapa yang menyeleksi (*Selectorate*)?
3. Dimana kandidat di seleksi?
4. Bagaimana kandidat dinominasikan?

Berdasarkan teori di atas, peneliti mencoba menganalisis proses seleksi kandidat yang dilakukan DPD Partai NasDem Kota Bamdar Lampung yang dilakukan dengan penilaian (skoring) berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai NasDem

No. SKEP-009/DPP-NasDem/III/2013 Tentang Pedoman Organisasi Tentang Tata Cara Pencalonan Legislatif Untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pemilu 2014 di Lingkungan Partai NasDem. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan kerangka Pikir

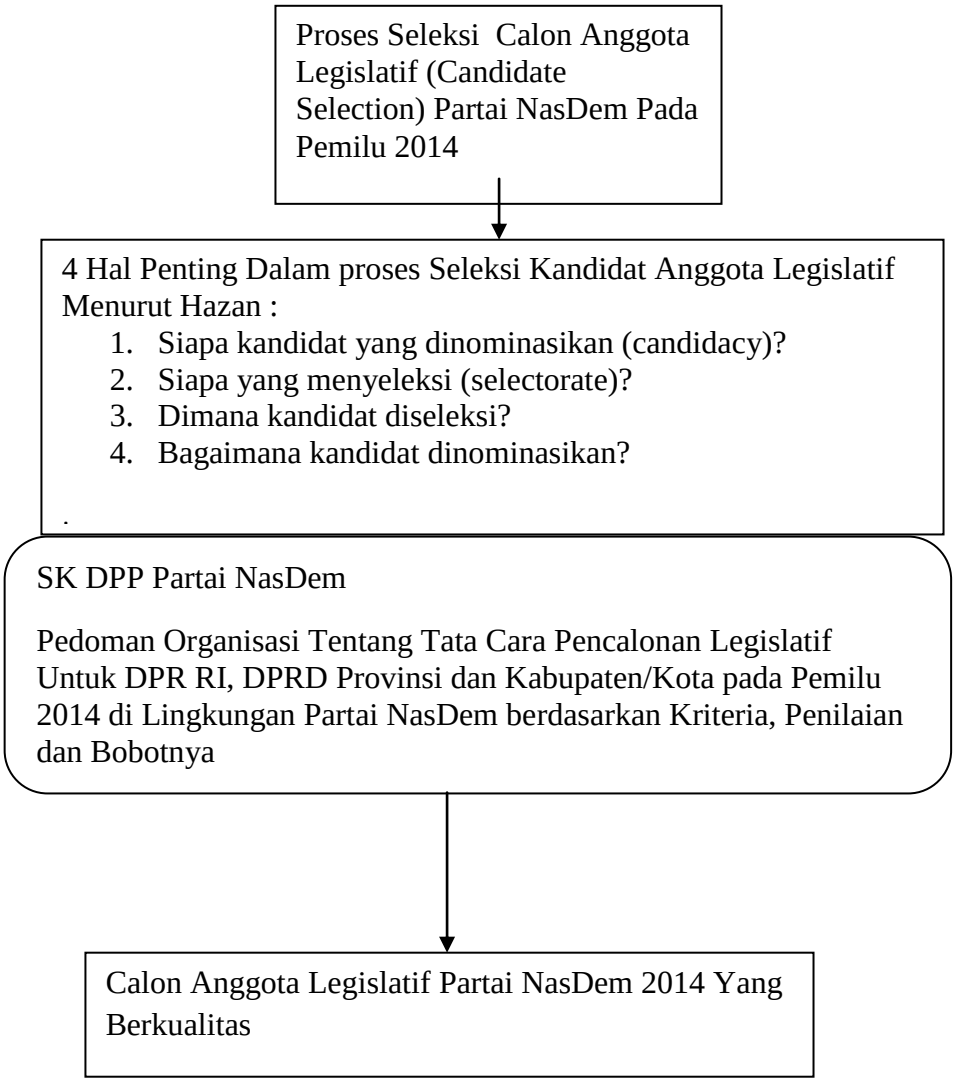

Gambar 2. Bagan Kerangka Fikir